

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 3 TAHUN 2006  
TENTANG BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
(LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2006 NOMOR ... SERI ...)

**ASBTRAK** :

- Bangunan sangat diperlukan bagi manusia sebagai tempat melakukan kegiatan untuk mencapai berbagai sasaran yang menunjang terwujudnya pembangunan nasional. Demi terwujudnya penyelenggaraan bangunan yang tertib, diperlukan pengaturan yang dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pendirian bangunan. Dengan telah dikeluarkannya UU 28 Tahun 2002 tentang bangunan, perlu adanya pengaturan di daerah tentang bangunan yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Maka dari itulah, Pemerintah Daerah Kota Depok menerbitkan Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Bangunan dan Retribusi IMB.
  
- Dasar Hukum : UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun; UU Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman; UU Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya; UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat; UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi; UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, kolusi, dan Nepotisme; UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUUan; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; PP Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun; PP Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan; PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; PP Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; PP Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; PP Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Kota; PP Nomor 66

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah; PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; PP Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan; PPan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintah Kota; Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pengisian Serta Pendaftaran Akta Pemisahan Rumah Susun; Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1989 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Buku Tanah Serta Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun; Kepmen PU Nomor 441/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Bangunan; Kepmen PU Nomor 468/KPTS/1998 tentang Persyaratan Teknis Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan; Kepmen Negara PU Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan dan Lingkungan; Perda Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Kepmen Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Perda; Perda Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok Tahun 2000-2010; Perda Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Depok Nomor 17 Tahun 2003; Perda Depok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Perda Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan; Perda Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

- Perda ini mengatur tentang :
  1. KETENTUAN UMUM
  2. KETENTUAN UMUM
  3. ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP
  4. FUNGSI BANGUNAN
  5. PERSYARATAN ADMINISTRASI BANGUNAN
  6. PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN
  7. PENYELENGGARAAN BANGUNAN
  8. RUMAH SUSUN
  9. PERAN MASYARAKAT
  10. PEMBINAAN
  11. RETRIBUSI
  12. SANKSI
  13. PENYIDIKAN
  14. KETENTUAN LAIN-LAIN
  15. KETENTUAN PERALIHAN
  16. KETENTUAN PENUTUP

**STATUS :**

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dengan ditetapkan Perda ini, maka Perda Depok Nomor 2 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku dan Perda Depok Nomor 18 Tahun 2003 tentang Garis Sempadan serta Lampiran IX Perda Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dinyatakan tidak berlaku setelah Peraturan Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- Perda ini diundangkan pada tanggal 26 September 2006

**CATATAN :**

- Dengan berlakunya Perda ini, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota dinyatakan tetap berlaku. Bangunan yang belum memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi/huni berdasarkan Perda ini. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak Perda ini ditetapkan, bagi bangunan fungsi usaha dan rumah susun yang telah didirikan sebelum Perda ini ditetapkan, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi/huni.